



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2021-2022**

**KAMIS, 14 APRIL 2022**

**DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2021-2022**

**KAMIS, 14 APRIL 2022**

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

**Yang kami hormati:**

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Saya atas nama Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPR RI yang telah berkomitmen untuk bekerja optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya yang dilakukan di masa sidang ini.

Perkenankan Kami, atas nama Pimpinan DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di tanah air.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan IV ini DPR RI telah melakukan Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Rancangan Undang

Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang Undang.

Semangat pembentukan Undang Undang TPKS, selain memenuhi kebutuhan hukum nasional juga untuk memberikan perlindungan bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban secara tepat, cepat dan komprehensif.

Kehadiran Undang Undang ini agar menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Undang Undang TPKS merupakan komitmen kita bersama agar tidak ada ruang bagi kekerasan seksual di Negara Republik Indonesia.

Dalam Masa Persidangan ini, DPR RI juga telah melakukan Pengambilan Keputusan terhadap 3 (*tiga*) Rancangan Undang Undang sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

Selain itu, pada masa persidangan ini DPR RI melalui Komisi dan AKD terkait, tengah melakukan

Pembahasan Rancangan Undang Undang yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I, diantaranya:

1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. RUU tentang Penanggulangan Bencana;
3. RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

Tugas legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen bersama, Pemerintah dan DPR RI. Oleh karena itu, kinerja legislasi harus menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan Produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya utk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Dalam satu bulan terakhir ini, DPR RI terus mencermati perkembangan geopolitik internasional serta perekonomian global dan domestik, di tengah upaya kita mengendalikan gelombang ketiga Covid-19 sejak awal Februari silam. Perkembangan global tersebut, perlu segera diantisipasi khususnya yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan rakyat serta kapasitas fiskal untuk dapat menjalankan pelayanan umum, perlindungan sosial, dan pembangunan nasional.

Kita patut bersyukur, melalui kerja bersama seluruh pihak, pengendalian gelombang ketiga Pandemi Covid-19 dapat ditangani dan diantisipasi dengan lebih baik, sehingga tidak berdampak berat bagi upaya pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

Melalui Komisi dan AKD terkait, DPR RI juga terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBN pada

Kuartal Pertama tahun 2022 ini, agar dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

Pemerintah agar segera mengantisipasi peningkatan risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina, serta normalisasi kebijakan moneter oleh negara-negara maju. Perkembangan kondisi global tersebut secara langsung telah mendorong peningkatan komoditas energi, pangan, dan komoditas lainnya yang sangat luar biasa.

Kenaikan signifikan tersebut telah berimbas pada meningkatnya tekanan inflasi domestik, yang tercermin dari kenaikan harga beberapa barang-barang strategis di dalam negeri. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung; Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan kestabilan harga berbagai komoditas; Pemerintah memastikan agar dapat menjaga daya beli

masyarakat serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti berbagai masalah yang menarik perhatian masyarakat, antara lain:

1. Permasalahan Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM);
3. Percepatan Program Vaksinasi dan Booster Vaksin Covid-19;
4. Pengamanan dan Pengawasan Pasokan serta Distribusi Bahan Pangan selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
5. Permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng;
6. Permasalahan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak;



7. Penerapan PPKM dan Kesiapan Menghadapi arus Mudik Lebaran;
8. Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M;
9. Permasalahan Penipuan Investasi Ilegal.

Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah agar segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Pada Masa Persidangan IV, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap:

1. 7 (*tujuh*) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021–2025;
2. 2 (*dua*) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2022-2027;
3. 7 (*tujuh*) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027; dan

Selain itu DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 9 (*sembilan*) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Pada masa sidang ini, Parlemen Indonesia telah sukses menyelenggarakan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 21-24 Maret 2022, yang dihadiri oleh 121 negara anggota. Pertemuan

ini menghasilkan sejumlah resolusi dan rekomendasi, antara lain Deklarasi Nusa Bali yang memerangi perubahan iklim dan resolusi konflik Rusia-Ukraina.

DPR RI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah, Masyarakat Bali, serta seluruh pihak, sehingga penyelenggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 dapat berjalan dengan baik; sukses penyelenggaraan, sukses agenda sidang, dan sukses mempromosikan Indonesia.

Dalam Masa Persidangan ini, Delegasi DPR RI juga telah melakukan Pertemuan Internasional, diantaranya:

1. Pertemuan dengan delegasi Rumania. Pertemuan ini menitikberatkan pada peningkatan kerja sama ekonomi, pariwisata, serta peninjauan kerja sama di bidang budaya dan pendidikan.
2. Pertemuan dengan delegasi Peru pada 31 Maret 2022. Pertemuan bilateral ini memberi harapan akan potensi kerja sama khususnya di bidang transisi energi, perubahan iklim, pariwisata serta

pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui kerangka *Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

***Sidang Dewan yang Terhormat,***

Saya atas nama Pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras kita semua, Anggota DPR RI, yang terus bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat dan memastikan negara hadir dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

Saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 15 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Masa reses merupakan kesempatan bagi Yang Terhormat Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan, dan ikut

memperkuat dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong, semangat untuk kerja bersama memajukan Indonesia

Kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menyampaikan “Selamat Bekerja” pada Masa Reses, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Atas nama Pimpinan dan Anggota DPR RI, perkenankan Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H kepada seluruh rakyat Indonesia, “Semoga kemenangan pada bulan Ramadhan semakin meningkatkan kepedulian, solidaritas dan semangat gotong royong kita dalam menghadapi ujian Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.”

***Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**Dr. (H.C) PUAN MAHARANI**

## **LAMPIRAN**

### **1. Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025, sebagai berikut:**

1. Arya Sandhiyudha (masyarakat);
2. Donny Yoesgiantoro (masyarakat);
3. Gede Narayana (pemerintah);
4. Handoko Agung Saputro (masyarakat);
5. Rospita Vici Paulyn (masyarakat);
6. Samrotunnajah Ismail (pemerintah); dan
7. Syawaludin (masyarakat).

### **2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2022-2027, yaitu:**

1. Ismayatun
2. Haerul Saleh

### **3. 7 (*tujuh*) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027, antara lain:**

1. Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.;
2. Mirza Adityaswara;

3. Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M.;
4. Inarno Djajadi;
5. Ir. Ogi Prastomiyono, M.B.A.;
6. Sophia Issabella Watimena, S.E., C.A., M.B.A.;
7. Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A.

**4. 1 (satu) Rancangan Undang Undang (RUU) Menjadi Undang Undang, yaitu:**

1. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**5. Pengambilan Keputusan RUU Usul Inisiatif DPR RI, yaitu:**

1. RUU tentang Provinsi Papua Selatan;
2. RUU tentang Provinsi Papua Tengah;
3. RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.

**6. Pembahasan Rancangan Undang Undang Tingkat I, diantaranya:**

1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. RUU tentang Penanggulangan Bencana;
3. RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
4. RUU tentang Hukum Acara Perdata;

5. RUU tentang Praktik Psikologi;
6. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang  
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Perundang-undangan;
7. RUU tentang Landas Kontinen.